

PEMETAAN MUTU AKREDITASI PAUD DAN PNF di KABUPATEN KULONPROGO, YOGYAKARTA

Mapping Quality Of PAUD And PNF Accreditation In Kulonprogo District, Yogyakarta

ROYATI ILYAS

TKA Jagat Raya Kedondong, Susukan, Cirebon.

E-mail: royati.yati1996@gmail.com

Diterima : 13 Oktober 2020; Direvisi: 30 November 2020; Disetujui : 30 Desember 2020

DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.83>

Abstract

Accreditation is one of the governments to improve the quality of education. Likewise, to ensure the quality of education at the PAUD and PNF levels, the government held an accreditation program. However, it still has issues that need to be resolved. This study aims to identify and describe the problems of accreditation and quality mapping in the Education Office of Kulonprogo Regency. This research uses a qualitative approach and type of case study research. Based on the results of this research, in mapping the quality of accreditation in PAUD and PNF in Kulonprogo Regency, the first activity carried out was to conduct a quality mapping analysis of each institution. And the results show that the average standard kindergarten, KB, Pos PAUD, LPK and PKBM institutions that must be supervised strictly is the standard of financing. After conducting the analysis, a workshop was conducted with the Dikpora and all PAUD and PNF heads.

Keywords: *Quality mapping, accreditation, PAUD, PNF.*

Abstrak

Akreditasi merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan. Begitupun juga untuk menjamin mutu pendidikan di jenjang PAUD dan PNF, pemerintah mengadakan program akreditasi. Namun, hal itu masih memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan akreditasi dan pemetaan mutu di Dinas pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan pada hasil riset ini, dalam pemetaan mutu akreditasi pada PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, kegiatan pertama yang dilakukan ialah melakukan analisis pemetaan mutu dari setiap lembaga. Hasil menunjukkan bahwa rerata lembaga TK, KB, Pos PAUD, LPK dan PKBM standar yang harus disupervisi ketat rerata ialah pada standard pembiayaan. Setelah melakukan analisis, kemudian dilakukan workshop bersama pihak Dikpora dan seluruh kepala PAUD dan PNF.

Kata Kunci: *Pemetaan mutu, akreditasi, PAUD, PNF.*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu melakukan akreditasi di lembaga sekolah. Merujuk pendapat dari Ratih (2019) bahwa Akreditasi adalah suatu mekanisme penilaian yang dilakukan oleh lembaga/institusi/perorangan yang menilai tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dokumen/program lembaga dengan menggunakan suatu kriteria standar tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan akreditasi, lembaga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan dan menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Seluruh lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, melakukan akreditasi sekolah untuk menjamin mutu lembaga tersebut. Akreditasi di lembaga PAUD cukup krusial. Komitmen tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Ditjen PAUD dan Dikmas sejak tahun 2010-2015 dalam rangka menunjang visi Indonesia Emas 2045. Cita-cita tersebut dilatarbelakangi dengan adanya bonus

demografi terhitung sejak tahun 2010-2035 (data proyeksi BPS: 2010) dengan kesimpulan bahwa untuk mempersiapkan Indonesia EMAS 2045 program penguatan yang pertama dan utama adalah pada pendidikan anak usia dini.

Sejalan dengan pentingnya akreditasi di lembaga PAUD, Tilaar (2006) mengemukakan bahwa Satuan PAUD sebagai lembaga sosial yang merupakan suatu institusi publik yang bertujuan untuk mewujudkan dan menghasilkan insan bertakwa dan mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia. Sebagai suatu lembaga publik tentunya lembaga tersebut harus akuntabel, transparan, terbuka, dapat dinilai oleh pihak internal dan eksternal, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja lembaga pendidikan tersebut haruslah mempunyai indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan Permendiknas RI No. 58 Tahun 2009 menyatakan bahwa;

“Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.”

Ditulis juga dalam buku Pendidikan Usia Dini tentang bentuk pendidikan anak usia dini (Martin Handoko, 2004):

“Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.”

Sejalan dengan tujuan pendidikan anak usia dini yang diungkapkan oleh Martin Handoko, guna menunjang mutu pendidikan di PAUD, Kementerian Pendidikan Indonesia mengadakan akreditasi PAUD. Permendikbud No 13 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 3 dijelaskan bahwa peringkat terakreditasi satuan pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat akreditasi.

Merujuk pada BANPAUDPNF (2019) menyatakan bahwa akreditasi PAUD menilai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun 8 SNP terdiri atas:

1. Output (TPPA)

Standard ini menilai potensi anak (fisik dan mental) tumbuh dan berkembang secara optimal, 6 aspek perkembangan dapat dicapai sesuai

tingkat usia/tahap perkembangan dan kebutuhan spesifikasinya.

2. Isi

Standar ini menilai stimulasi terhadap semua potensi kecerdasan anak (fisik dan mental) secara optimal.

3. Proses

Standar ini menilai proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan melalui pembiasaan dan keteladanan secara berkesinambungan, serta memberdayakan semua potensi yang ada disekitar anak.

4. Penilaian

Bagaimana melakukan penilaian otentik pd anak serta pelaporannya kepada orang tua. Penilaian selama proses pembelajaran, mengedepankan pengamatan thdp setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur ketercapaian *output/TPPA*.

5. PTK

- Pendidik: sabar & sayang kepada anak, memahami karakteristik & kebutuhan belajar anak, komunikatif dengan anak, kreatif, paham cara mendidik anak.

- Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, kreatif.
6. Pembiayaan
Orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab untuk mendukung pembiayaan program pembelajaran di PAUD.
 7. Pengelolaan
Memastikan seluruh proses pembelajaran. Dapat direncanakan, dirkoordinasikan, dilaksanakan & dikontrol dengan baik untuk mencapai output yg diharapkan.
 8. Sarana Prasarana
Mengoptimalkan pemberdayaan potensisarpras yang tersedia di alam sekitar (tidak harus beli), yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar secara menyenangkan & aman untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan, minat dan bakatnya.
- Regulasi terkait akreditasi PAUD dan PNF yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan PAUD dan PNF, namun pada kenyataannya, saat observasi di Dinas

Pendidikan (DIKPORA) Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa lembaga PAUD di Kulonprogo, banyak lembaga PAUD dan PNF yang merasa kesulitan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan sebagai persyaratan akreditasi sekolah. Sehingga, pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan akreditasi di PAUD dan PNF di Kulonprogo, dan mengidentifikasi kegiatan pemetaan mutu yang dilakukan oleh DIKPORA Kulonprogo.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, Penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus. Menurut Ulber (2012:186) bahwa studi kasus merupakan jenis penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam suatu anggota dari kelompok sasaran suatu objek penelitian.

Sumber data utama yaitu kepala PAUD dan PNF, serta Kepala Seksi Bidang Kurikulum PAUD dan PNF. Sumber data pendukung yaitu dua orang pengawas PAUD PNF. Sumber data ini dipilih berdasarkan situasi

sosial dan tujuan penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang memiliki pengalaman dan dipandang memahami mengenai situasi sosial di lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan 3 responden, studi dokumentasi dan observasi.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan mewawancarai berbagai sumber selain kepala sekolah dengan melakukan wawancara mendalam. Pada triangulasi metode menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan untuk penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data berupa teks atau gambar, lalu mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses

pengodean sekaligus peringkasan data, dan diakhiri dengan menyajikan data melalui bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Akreditasi pada PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo

Kelompok PAUD dan PNF ini, dibagi menjadi beberapa jenis lembaga. Diantaranya yaitu: TK, KB, POS PAUD, LKP, dan PKBM. Pada PAUD dan PNF, terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Merujuk pada BANPAUD (2019) menyatakan bahwa akreditasi PAUD menilai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun 8 SNP terdiri atas:

1. *Output* (TPPA)

Standard ini menilai potensi anak (fisik dan mental) tumbuh dan berkembang secara optimal, 6 aspek perkembangan dapat dicapai sesuai tingkat usia/tahap perkembangan dan kebutuhan spesifikasinya.

2. Isi

Standar ini menilai stimulasi terhadap semua potensi kecerdasan anak (fisik dan mental) secara optimal.

3. Proses

Standar ini menilai proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan melalui pembiasaan dan keteladanan secara berkesinambungan, serta memberdayakan semua potensi yang ada disekitar anak.

4. Penilaian

Bagaimana melakukan penilaian otentik pd anak serta pelaporannya kpd orang tua. Penilaian selama proses pembelajaran, mengedepankan pengamatan thdp setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur ketercapaian *output*/TPPA.

5. PTK

- Pendidik: sabar & sayang kepada anak, memahami karakteristik & kebutuhan blj anak, komunikatif dg anak, kreatif, paham cara mendidik anak.
- Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, kreatif.

6. Pembiayaan

Orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab untuk mendukung pembiayaan program pembelajaran di PAUD.

7. Pengelolaan

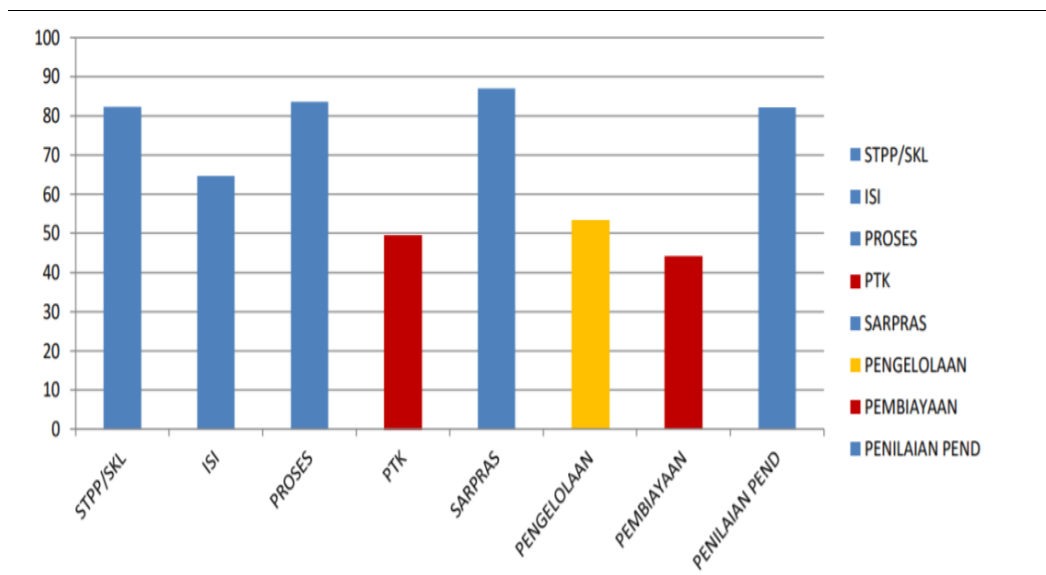
Memastikan seluruh proses pembelajaran. Dapat direncanakan, dirkoordinasikan, dilaksanakan & dikontrol dengan baik untuk mencapai output yg diharapkan.

8. Sarana Prasarana Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sarpras yang tersedia di alam sekitar (tidak harus beli), yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar secara menyenangkan & aman untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan, minat dan bakatnya.

Seluruh PAUD dan PNF yang hendak mengikuti akreditasi, harus memenuhi standarisasi pada 8 SNP tersebut. Berikut juga penelitian ini membahas mengenai permasalahan PAUD dan PNF dalam menyiapkan 8 SNP untuk akreditasi.

a. Permasalahan Akreditasi TK di Kabupaten Kulonprogo

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kulonprogo yang hendak di akreditasi sebanyak 58 lembaga TK. Berikut grafik pemetaan mutu pada 58 TK di Kulonprogo.



Sumber : Data primer hasil riset

Grafik 1. Rerata hasil pemetaan mutu pada kelompok lembaga TK di Kulonprogo

Berdasarkan grafik 1, dari lembaga TK di kabupaten Kulonprogo, 5 SNP yang sudah siap untuk diakreditasi, dengan ditandai warna biru pada grafik tersebut, yaitu Standar STPP/SKL, Isi, Proses, sarana prasarana, dan penilaian pendidikan. Standar Pengelolaan yang ditandai warna kuning pada lembaga TK masih harus terus ditingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil analisis rerata setiap standar pada kelompok TK, menunjukkan bahwa terdapat dua standar yang masih belum memenuhi syarat, yaitu: standar PTK dan Pembiayaan.

Sejalan dengan data tersebut, berikut hasil wawancara dengan salah satu kepala TK di Kulonprogo.

“Untuk standard PTK, sekolah kita memang mengalami kesulitan. Karena tenaga pendidik di TK sangat terbatas, dan karena kita bermasalah pada keuangan, kita juga bermasalah pada standard PTK.” (KS.TK.1)

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas, rerata permasalahan yang utama dihadapi oleh lembaga TK di Kulonprogo yaitu standar PTK dan keuangan. Karena sedikit sumber keuangan untuk TK di Kulonprogo.

Permasalahan standar PTK pada PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo sejalan dengan

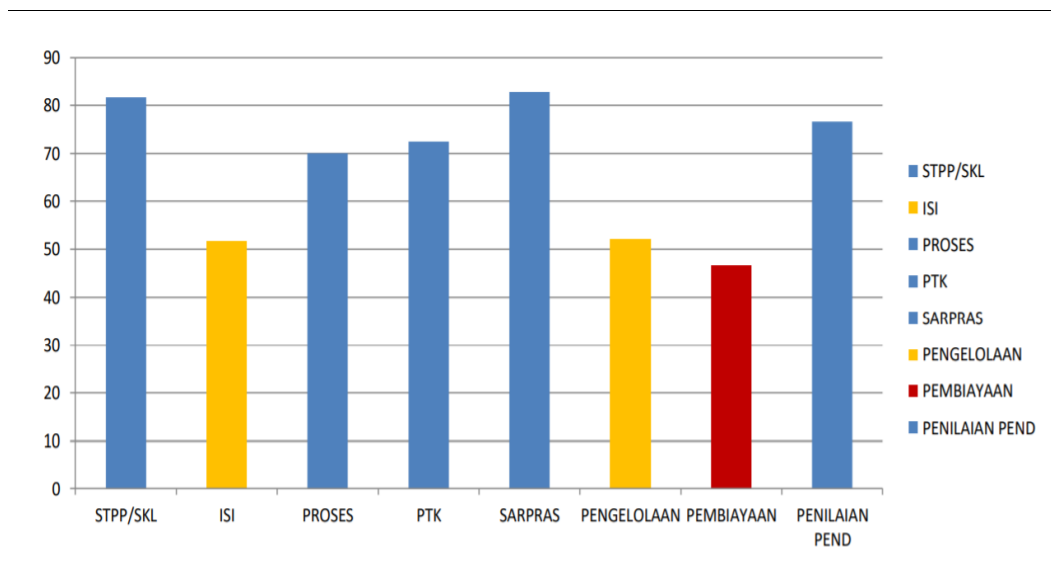
permasalahan PTK yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dari Muktiono (2006) Menyatakan bahwa Keberadaan instruktur dan penguji kursus terkonsentrasi pada kota-kota besar. Sulit mendapatkan narasumber teknis PNF yang memiliki kompetensi

sesuai dengan yang dibutuhkan penyelenggara program/peserta didik PNF. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sulitnya memenuhi standard PTK.

b. Permasalahan Akreditasi Kelompok KB dan Pos PAUD di Kabupaten Kulonprogo

Jumlah KB dan Pos PAUD di Kabupaten Kulonprogo berjumlah 30

lembaga. Berikut grafik pemetaan mutu pada 30 lembaga KB dan Pos PAUD.



Sumber : Data primer dari Dikpora Kulonprogo

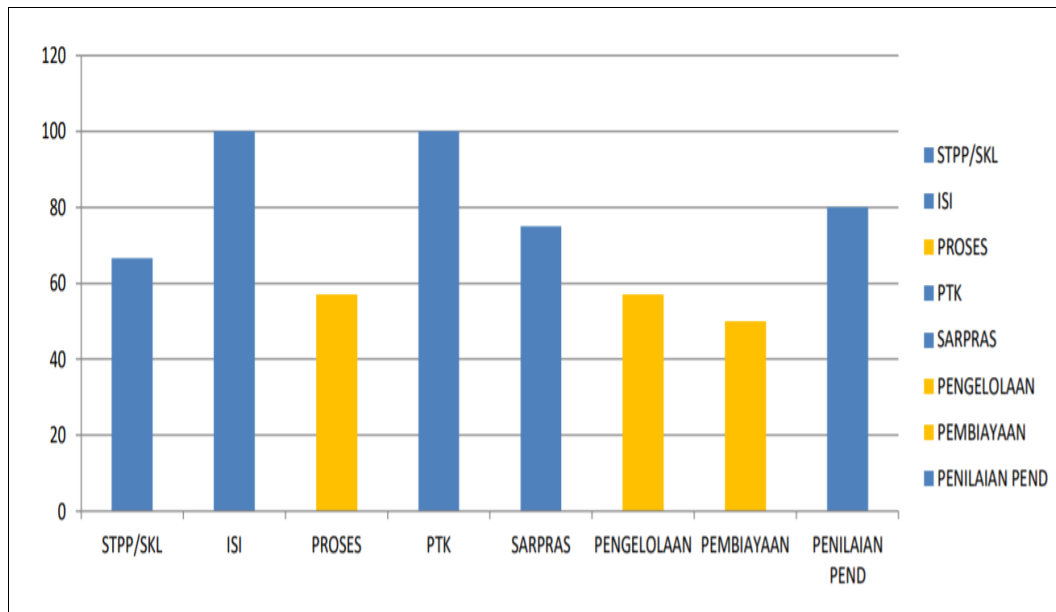
Gambar 2. Hasil pemetaan mutu KB dan Pos PAUD

Berdasarkan hasil dari pemetaan mutu di 30 lembaga KB dan Pos PAUD Kabupaten Kulonprogo, terlihat bahwa 5 Standar siap untuk maju akreditasi. 5 standar tersebut ialah STPP/SKL, Proses, PTK, Sarpras dan Penilaian

pendidikan. Gambar yang berwarna kuning (Standar Isi dan Pengelolaan) menunjukkan masih harus terus diperbaiki. Serta pada grafik yang berwarna merah (Standar pembiayaan) masih belum siap untuk maju akreditasi

c. Permasalahan Akreditasi Kelompok LPK di Kabupaten Kulonprogo

Jumlah LPK di Kabupaten Kulonprogo yang maju akreditasi hanya 1 lembaga. Berikut hasil pemetaan mutu dari lembaga tersebut.



Sumber : Data primer hasil penelitian di Dikpora Kulonprogo

Grafik 3. Hasil pemetaan mutu LKP

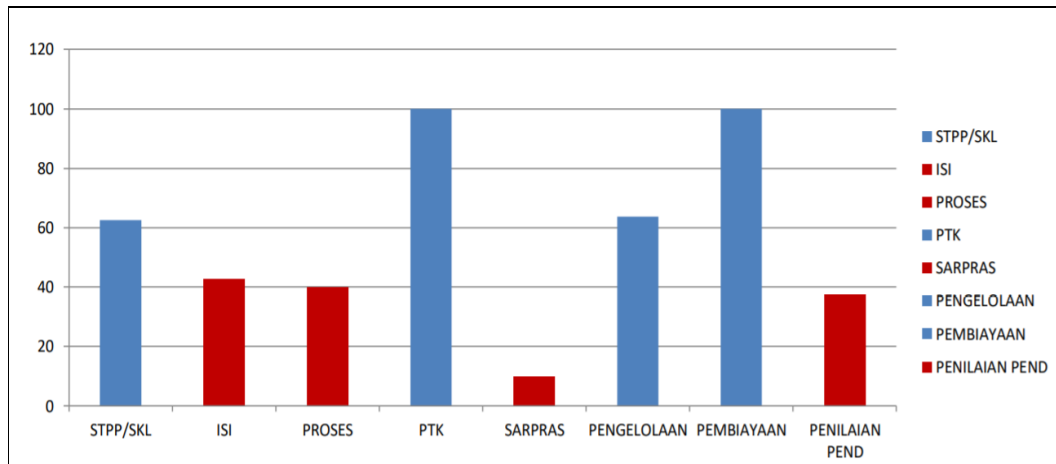
Berdasarkan data diatas, dari hasil pemetaan mutu di LKP, dilihat bahwa 5 standar yang berwarna biru (STPP/SKL, Isi, PTK, Sarpras, dan Penilaian Pendidikan) sudah siap untuk diakreditasi. Namun 3 standar yang masih berwarna kuning (Proses, Pengelolaan, dan Pembiayaan) masih perlu diperbaiki agar bisa mengikuti akreditasi.

Artinya, lembaga LKP tersebut perlu memperbaiki 3 standar. Yaitu:

proses, pengelolaan dan pembiayaan. Standar proses secara aplikatifnya dilihat dari perencanaan program pelatihan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelatihan. Standard Pengelolaan memastikan seluruh proses pembelajaran, dapat direncanakan, dirkoordinasikan, dilaksanakan & dikontrol dengan baik untuk mencapai *output* pelatihan yg diharapkan.

d. Permasalahan Akreditasi Kelompok PKBM di Kabupaten Kulonprogo

Lembaga PKBM di Kabupaten Kulonprogo berjumlah 2 lembaga. Berikut hasil pemetaan mutu PKBM di Kabupaten Kulonprogo.



Sumber: Data primer hasil riset di Dikpora Kulonprogo

Grafik 4. Hasil pemetaan mutu PKBM di Kulonprogo

Merujuk pada grafik hasil pemetaan mutu diatas, dapat dilihat terdapat 4 standar yang sudah siap untuk akreditasi. Yaitu standard STPP/SKL, PTK, Pengelolaan, dan pembiayaan. Sedangkan, masih ada 4 standar yang berwarna merah (Isi, proses, sarpras dan penilaian pendidikan). Standar yang masih berwarna merah artinya standar tersebut tidak bisa untuk diakreditasi karena nilainya dibawah standar.

Hasil standar tersebut diperkuat dari hasil *interview* kepada kepala seksi kurikulum dan penilaian PAUD PNF Dikpora Kabupaten Kulonprogo:

“Tantangan kita di seksi ini masih banyak. Terutama untuk pemetaan mutu di PKBM. Upaya peningkatan mutu di PKBM lebih kita fokuskan untuk meningkatkan standard Isi, Proses, sarpras dan penilaian pendidikan.” (KS.DA.2)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, pentingnya suatu peningkatan mutu dilembaga PNF menurut Indrawan dan Wijoyo (2020) bahwa tujuan akreditasi PNF adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar Standar Nasional Pendidikan dengan kreteria yang bersifat terbuka. Selain dalam menentukan kelayakan, tujuan akreditasi juga dapat

meningkatkan daya saing lembaga serta menarik kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga yang telah terakreditasi.

Pemetaan Mutu Pada lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo

Pemetaan mutu bertujuan untuk membantu lembaga PAUD dan PNF dalam persiapan akreditasi. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh seksi kurikulum dan penilaian PAUD PNF. Berikut hasil wawancara kepada penanggungjawab akreditasi PAUD dan PNF.

“Pelajaran dari tahun-tahun kemarin dalam melakukan akreditasi, ketika penilik dari BANPAUDPNF datang ke lembaga, ternyata masih banyak lembaga yang tidak memenuhi standard. Hal tersebut yang melatar belakangi kami untuk mengadakan pemetaan mutu. Pemetaan mutu ini untuk mengidentifikasi standard mana saja yang masih perlu ditingkatkan, dan lembaga mana saja yang masih perlu ditingkatkan untuk beberapa standard” (KW.DA.3)

Merujuk hasil wawancara diatas, pemetaan mutu bertujuan untuk mengidentifikasi rerata standard yang masih perlu ditingkatkan. Dalam pemetaan mutu, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Dikpora Kulonprogo. Sebagaimana yang

dipaparkan oleh kepala seksi kurikulum dan penilaian PAUD PNF.

“dalam melakukan pemetaan mutu, kita melakukan beberapa hal. Yaitu: analisis dari hasil penilaian oleh pengawas, mengadakan workshop bersama internal Dikpora dan seluruh lembaga PAUD PNF dari hasil analisis tersebut, dan workshop bersama BANPAUDPNF, dan setelah itu peninjauan serta pendampingan oleh pengawas.” (KS.DA.2)

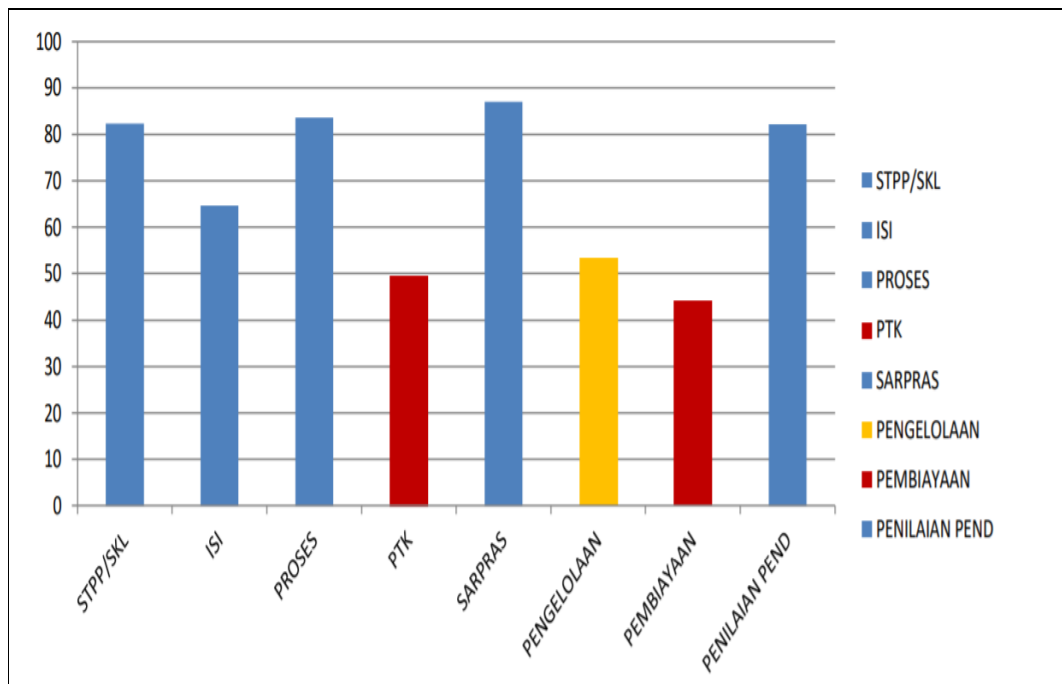
Sejalan dengan pemaparan diatas, pentingnya pemetaan mutu telah dicantumkan dalam Peraturan direktur jendral pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa menentukan efektivitas pemetaan mutu satuan dan/atau program yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pengelolaan satuan dan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas yang makin efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan dari kepala seksi kurikulum dan penilaian PAUD PNF, terdapat beberapa langkah pada proses pemetaan mutu. Berikut langkah-langkah dalam proses pemetaan mutu:

1. Analisis Pemetaan Mutu

Pada bagian analisis pemetaan mutu ini, terdiri dari dua jenis analisis yaitu: analisis rerata nilai per standard

dari setiap kelompok TK, KB, Pos PAUD, LKP dan PKBM. Berikut contoh hasil analisis rerata pemetaan mutu kelompok TK.



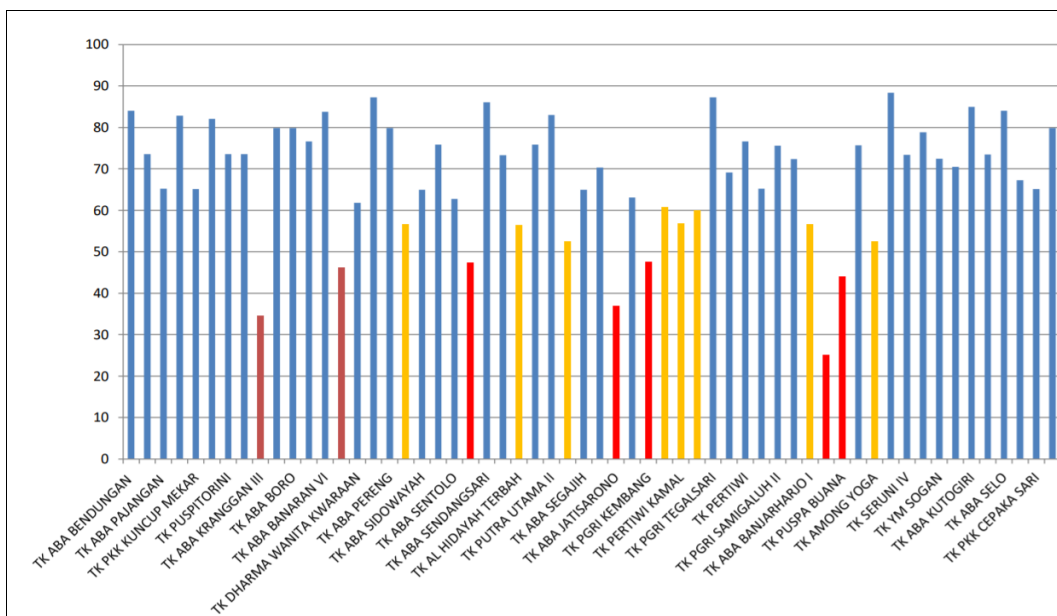
Sumber : Data primer hasil riset di Dikpora Kulonprogo

Grafik 5. Hasil pemetaan mutu kelompok TK

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tersebut, diidentifikasi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berwarna biru yang memiliki arti bahwa standard tersebut sudah siap untuk diakreditasi; grafik yang berwarna kuning memiliki arti bahwa standard tersebut bernilai pas rata-rata nilai akreditasi. Jadi, standar yang berwarna kuning masih perlu peningkatan mutu. Terakhir, grafik berwarna merah yang berarti

bernilai dibawah rata-rata akreditasi. Artinya, standar tersebut perlu pendampingan dari pengawas.

Setelah menganalisis rerata standar pada setiap kelompok lembaga, kemudian dianalisis setiap lembaga yang masih perlu pendampingan. Berikut contoh hasil analisis pemetaan mutu pada kelompok TK.



Sumber: Data primer hasil riset

Grafik 6. Hasil pemetaan mutu pada kelompok TK

Grafik diatas mengidentifikasi setiap lembaga. Sehingga, dapat dilihat secara jelas lembaga yang harus disupervisi ketat, dan mana lembaga yang perlu ditingkatkan sedikit untuk mutunya. Lembaga yang disupervisi ketat ditandai dengan grafik berwarna merah.

Setelah dianalisis dan dapat terlihat lembaga mana saja yang perlu supervise ketat dan standard apa yang perlu disupervisi, kemudian pihak Dikpora mengadakan workshop bersama seluruh kepala lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo.

2. Workshop Pemetaan Mutu

Workshop pemetaan mutu dilakukan bersama para pengawas,

kepala seksi kurikulum dan penilaian PAUD PNF, dan seluruh kepala lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo. Workshop tersebut membahas mengenai hasil dari analisis dan open diskusi bersama seluruh kepala sekolah PAUD dan PNF. Kegiatan ini membawa manfaat dan termasuk program baru bagi lembaga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah.

“Ini baru pertama kali sih untuk pemetaan mutu, dan kita diikuti workshop untuk membahas hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh pihak Dikpora. Tentunya ini membuat kami semangat dan mengetahui standard mana saja yang perlu diperbaiki.”(KS.PAUD.4)

Berdasar ungkapan dari salah satu kepala sekolah diatas, kegiatan workshop pemetaan mutu ini menjadi sebuah hal baru dan pihak lembaga PAUD dan PNF pun merasakan manfaatnya. Karena dengan mengetahui hasil analisis diatas, lembaga PAUD dan PNF dapat menjadi semakin semangat dan mereka mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan.

3. Workshop bersama BANPAUDPNF

Setelah workshop internal bersama pihak Dikpora dan seluruh

kepala PAUD dan PNF, kemudian workshop bersama BANPAUDPNF untuk memberikan rambu-rambu dalam melakukan akreditasi dan pelatihan penggunaan laporan pada SISPENA. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pihak PAUD dan PNF untuk mengupload dokumen persyaratan akreditasi. Setelah melakukan kedua workshop tersebut, dilanjutkan supervise dan pendampingan dari pengawas PAUD PNF di Kabupaten Kulonprogo.

PENUTUP

Penutup pada artikel ini diulas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Kesimpulan

Program akreditasi sekolah masih dirasa cukup sulit untuk lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan masih banyak standar yang belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dinas pendidikan Kabupaten Kulonprogo melakukan pemetaan mutu.

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pemenuhan

akreditasi di lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, dan pemetaan mutu yang dilakukan oleh Dikpora Kabupaten Kulonprogo. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan akreditasi pada lembaga PAUD dan PNF, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pemetaan mutu yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan evaluasi untuk setiap lembaga PAUD dan PNF di kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pemenuhan akreditasi di lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, dan pemetaan mutu yang dilakukan oleh Dikpora Kabupaten Kulonprogo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mengalami permasalahan dalam memenuhi standar nasional pendidikan sebagai suatu persyaratan untuk memenuhi akreditasi lembaga PAUD dan PNF.

Berdasarkan pada hasil riset ini, dalam pemetaan mutu akreditasi pada PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo, kegiatan pertama yang dilakukan ialah melakukan analisis

pemetaan mutu dari setiap lembaga. Hasil menunjukkan bahwa rerata lembaga TK, KB, Pos PAUD, LPK dan PKBM standar yang harus disupervisi ketat rerata ialah pada standar pembiayaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberi saran kepada pemerintah untuk memperhatikan setiap standard yang masih membutuhkan supervisi ketat, dan membantu lembaga untuk meningkatkan mutu tersebut. Serta lembaga PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo untuk memperhatikan hasil pemetaan mutu dari dinas pendidikan setempat. Serta riset mengenai pemetaan mutu ini dapat diperdalam dengan membahas setiap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoko Martin. 2004. Pendidikan Usia Dini. Jakarta:Grasindo.
- H.A.R Tilaar. 2016. Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), p. 105
- Indrawan, Irjus dan Hadion Wijoyo. 2020. Pengelolaan PAUD dan PNF Berbasis Mutu. Banyumas: CV. Pena Persada.

- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 01 TAHUN 2016. Retrived from https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2017/12/01_PEMETAAN_IM-1.pdf.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2009. Permendiknas No.58

- Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sari, Permata Ratih. 2019. Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal Tinta* , Vol. 1 No. 1, Hal. 117-133.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber, Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (2018) Retrieved from <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/sistem-penilaian-akreditasi-sispena-paud-dan-pnf>